

IMPLEMENTASI PROGRAM MANAJEMEN AGRIBISNIS TEBAKAU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BAHAN BAKU DI UPT AGRIBISNIS TEBAKAU KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG

Dadan Setia Nugraha¹, Difla Salsabila², Elena Nurdiana Rahmat³, Ikhsan Laksamana⁴,
M. Syahrindra Oktaviandhi⁵, Nadilah Pauziah⁶, Riska Putri Cahyani⁷

Universitas Sebelas April

Email *1: dadan_setia@unsap.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi Program Pengelolaan Agribisnis Tembakau berkontribusi dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Agribisnis Tembakau di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dipilih menggunakan teknik sampling purposif dan meliputi Kepala UPT Agribisnis Tembakau, petugas penyuluhan pertanian, dan petani tembakau yang dibantu. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Validitas data diuji melalui kredibilitas, transferabilitas, keandalan, dan konfirmabilitas. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pengelolaan Agribisnis Tembakau telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku melalui kegiatan pelatihan pengelolaan pertanian, bantuan teknis dalam budidaya dan penanganan pasca panen, serta penguatan institusi kelompok tani. Program ini telah memberikan manfaat dengan meningkatkan pemahaman petani tentang pengelolaan usaha tani yang lebih terencana dan terstruktur. Namun, pelaksanaan program dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kendala dalam alokasi anggaran DBHCHT, dan kurangnya intensitas optimal dalam bantuan pasca-pelatihan dan pemantauan. Oleh karena itu, perlu diperkuat mekanisme bantuan dan pemantauan, memprioritaskan perencanaan program, serta meningkatkan peran kelompok tani agar pelaksanaan Program Pengelolaan Agribisnis Tembakau dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas bahan baku tembakau di Kabupaten Sumedang.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Program Manajemen Agribisnis Tembakau

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah memiliki peran strategis sebagai perumus dan pengendali kebijakan publik agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif. Kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh proses implementasinya, yaitu tahap ketika kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh pelaksana di lapangan untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang hingga kini tetap memiliki peran fundamental dalam perekonomian nasional, khususnya bagi masyarakat perdesaan. Di tengah pergeseran struktur ekonomi ke arah industri dan jasa, pertanian termasuk komoditas tembakau masih menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan petani dan tenaga kerja dalam rantai agribisnis. Tembakau memiliki posisi unik dalam perekonomian Indonesia karena menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara dari sektor cukai, meskipun dikategorikan sebagai sin tax atau pajak atas barang yang berdampak negatif bagi kesehatan.

Besarnya kontribusi tembakau terhadap penerimaan negara dapat dilihat pada realisasi penerimaan cukai tahun 2024, di mana cukai hasil tembakau mendominasi total penerimaan cukai nasional.

Tabel 1. Jumlah Penerimaan Cukai Negara 2024

No	Jenis Penerimaan Cukai	Jumlah Realisasi
1	Hasil Tembakau	184,34
2	Ethil Alkohol	0,13
3	MMEA	8,13
4	Denda Administrasi Cukai	0,12
5	Cukai lainnya	0,02
6	Plastik	0,00
7	MBDK	0,00
Total		246,08

Sumber: APBN Kita 2024

Sebagian penerimaan cukai hasil tembakau tersebut dialokasikan kembali kepada daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DBHCHT ditetapkan sebesar 3% dari total penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri dan diperuntukkan bagi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, terutama daerah penghasil tembakau. Ketentuan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 menegaskan bahwa penggunaan DBHCHT diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas bahan baku tembakau dan penguatan kapasitas petani.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah penghasil tembakau di Provinsi Jawa Barat yang menerima alokasi DBHCHT. Pada tahun anggaran 2025, Kabupaten Sumedang menerima DBHCHT sebesar sekitar Rp34,22 miliar, dengan alokasi untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp3.250.838.095 atau sekitar 9,5% dari total DBHCHT kabupaten. Kabupaten ini memiliki potensi tembakau unggulan, khususnya varietas tembakau Mole yang dikenal memiliki aroma dan tekstur khas serta diminati oleh industri.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT dan meningkatkan kualitas bahan baku tembakau, Pemerintah Kabupaten Sumedang membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Agribisnis Tembakau. Salah satu program strategis yang dilaksanakan adalah Program Manajemen Agribisnis (Managris), yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani tidak hanya dari aspek teknis budidaya, tetapi juga dari sisi manajerial usaha tani. Program ini menekankan kemampuan petani dalam perencanaan usaha, pengelolaan biaya, pencatatan administrasi, analisis kelayakan usaha, serta strategi pemasaran, sehingga petani diposisikan sebagai pelaku agribisnis yang profesional dan berorientasi keberlanjutan.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, ditemukan beberapa indikasi permasalahan dalam implementasi program manajemen agribisnis di Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah penyuluh dan pegawai UPT Agribisnis Tembakau menjadi salah satu factor utama yang menghambat efektivitas pendampingan teknis kepada petani. Jumlah tenaga penyuluh yang relative sedikit tidak sebanding dengan luas wilayah binaan serta banyaknya kelompok tani yang harus dilayani, sehingga proses monitoring, pembinaan, dan supervise tidak dapat dilakukan secara intensif maupun berkelanjutan. Kondisi ini juga berdampak pada rendahnya intensitas pendampingan setelah petani mengikuti pelatihan Manajemen Agribisnis (Managris), di mana tidak ada pemantauan yang memadai terkait perubahan praktik budidaya di lapangan maupun penerapan materi pelatihan. Akibatnya, pelaksanaan budidaya kembali sepenuhnya diserahkan kepada petani tanpa evaluasi lanjutan, sehingga potensi peningkatan kualitas bahan baku tembakau melalui program pelatihan tidak dapat tercapai secara optimal.

Tabel 2. Jumlah Pegawai

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala UPT Agribisnis Tembakau	1
2.	Staf administrasi umum	1
3.	Analalis informasi pasar hasil tembakau	1
Total		3

2. Ketergantungan yang tinggi pada stake holder lain, seperti instansi terkait dan pelaku usaha, yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan program tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan awal. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian jadwal dan anggaran serta koordinasi yang intensif antar pihak, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan dan pelaporan kegiatan program.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan dan responsivitas menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan program Managris. Pelaksanaan program Managris di lapangan terganggu oleh rendahnya kepatuhan petani terhadap standard budidaya yang telah ditetapkan serta minimnya respons cepat dari pelaksana program ketika muncul keluhan atau kebutuhan baru. Petani sering kembali pada cara-cara tradisional karena tidak ada pemantauan berkelanjutan, sementara penyuluh tidak dapat merespons secara cepat akibat keterbatasan tenaga dan mekanisme birokratis yang memperlambat tindak lanjut. Ketika pelaksana tidak responsif dan petani tidak sepenuhnya patuh, alur implementasi menjadi terputus di tengah jalan. Kondisi ini menyebabkan materi pelatihan tidak benar-benar diterapkan, dan tujuan program untuk meningkatkan kualitas budidaya tembakau menjadi sulit tercapai.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memandang perlu dilakukan kajian ilmiah mengenai bagaimana program manajemen agribisnis tembakau diimplementasikan oleh UPT Agribisnis Tembakau serta sejauh mana program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau di Kabupaten Sumedang. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul “Implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau Dalam Meningkatkan Kualitas Bahan Baku di UPT Agribisnis Tembakau Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.”

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang juga dikenal sebagai metode naturalistik karena prosesnya berlangsung dalam situasi yang benar-benar alami (*natural setting*). Creswell (Murdiyanto, 2020) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai “suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.”

Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian yaitu dengan purposive sampling. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang UPT Agribisnis Tembakau, Analis Pasar UPT Agribisnis Tembakau, Ketua Kelompok Tani Malaka 2, dan Ketua Kelompok Mekar Saluyu.

Tabel 3. Subjek Penelitian

No	Unsur	Jumlah (orang)
1	Kepala Bidang UPT Agribisnis Tembakau Tanjungsari	1
3	Analis Pasar UPT Agribisnis Tembakau Tanjungsari	1
4	Ketua Kelompok Tani Malaka 2	1
5	Ketua Kelompok Mekar Saluyu	1
Jumlah		4

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

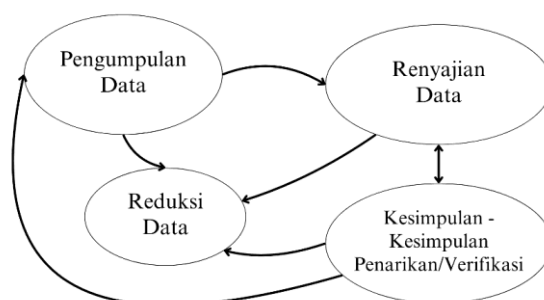
- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari berbagai literatur tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian terdahulu, dan dokumen akademik lainnya yang berkaitan dengan variable dalam penelitian ini.
- b. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu UPT Agribisnis Tembakau, dengan meliputi beberapa metode:
 1. Observasi atau Pengamatan
 2. Wawancara
 3. Dokumen
 4. Triangulasi

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu di adakan uji keabsahan data, sebagai berikut:

1. Uji *Kreadibility*
2. Uji *Transferability*
3. Uji *Dependability*
4. Uji *Konfirmability*

Data hasil wawancara dan observasi diolah dengan Teknik analisis sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian data)
3. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik kesimpulan)



Gambar 3. 1
Teknik Analisa Data

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap inilah berbagai rencana dan tujuan kebijakan diwujudkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Herman, 2016) yang menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui.”

Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi sangat bergantung pada bagaimana program tersebut dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan serta diterima dan dijalankan oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, implementasi menjadi indikator penting untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan program yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau di UPT Agribisnis Tembakau Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dipahami sebagai serangkaian aktivitas untuk menerjemahkan kebijakan peningkatan kualitas bahan baku tembakau ke dalam tindakan konkret. Implementasi program ini meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan pelatihan manajemen agribisnis, pendampingan petani, pengelolaan sumber daya, serta monitoring dan evaluasi hasil program.

Implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau yang didukung Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dikaji secara mendalam melalui penggunaan kerangka analisis implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, dengan menitikberatkan pada dimensi *content of policy* dan *context of implementation* yaitu sebagai berikut:

1. Content atau isi kebijakan, terdiri dari :
 - 1) *Interest affected* (Kepentingan yang Terpengaruh)
 - 2) *Type of benefits* (Tipe Manfaat)
 - 3) *Extent of change envisioned* (Perubahan yang akan Diwujudkan)
 - 4) *Site of decision making* (Kedudukan Pembuat Kebijakan)
 - 5) *Program implementers* (Para Pelaksana Program)
 - 6) *Resources committed* (Sumber Daya yang Dikerahkan)
2. Context atau lingkungan kebijakan, terdiri dari :
 - 1) *Power, interests, and strategies of actor involved* (Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi Para Aktor yang Terlibat)
 - 2) *Institution and regime characteristics* (Karakteristik Lembaga dan Penguasa)
 - 3) *Compliance and responsiveness* (Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana)

Content (Isi Kebijakan)

1. Kepentingan yang Terpengaruh (*Interests Affected*)

Implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau melibatkan kepentingan antara pelaksana program dan kelompok tani sebagai sasaran kebijakan. menunjukkan program ini melibatkan kepentingan UPT Agribisnis Tembakau sebagai pelaksana program dan kelompok tani sebagai sasaran kebijakan. Kelompok tani berkepentingan terhadap peningkatan kualitas dan nilai jual tembakau, sedangkan UPT berkepentingan terhadap keberhasilan program serta optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan kelompok tani untuk meningkatkan kualitas tembakau pada dasarnya sejalan dengan kepentingan UPT Agribisnis Tembakau dalam mencapai target program, meskipun keterbatasan implementasi membuat hasil yang dicapai belum optimal. Temuan ini sejalan dengan pandangan Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan atau

kegagalan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang terkandung dalam kebijakan tersebut (Ariyanti et al., 2024)

2. Jenis Manfaat yang Dihasilkan (*Type of Benefits*)

Manfaat yang dihasilkan dari program ini lebih bersifat peningkatan pengetahuan dan kapasitas petani dalam manajemen agribisnis tembakau. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan dalam bentuk perubahan praktik secara nyata di lapangan. Menurut Grindle, manfaat kebijakan yang bersifat tidak langsung memerlukan proses implementasi yang berkelanjutan agar dapat menghasilkan dampak nyata. Hal ini menjelaskan mengapa manfaat program belum sepenuhnya terwujud dalam perubahan praktik budidaya dan pascapanen secara luas.

3. Derajat Perubahan yang Diharapkan (*Extent of Change Envisioned*)

Program ini mengharapkan terjadinya perubahan dalam kualitas bahan baku tembakau dan pola pengelolaan usaha tani. Dalam kerangka Grindle, semakin besar perubahan yang diharapkan, semakin besar pula tantangan implementasi yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut masih berlangsung secara bertahap karena keterbatasan sumber daya dan pendampingan.

4. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Pengambilan keputusan dalam implementasi program berada pada UPT Agribisnis Tembakau dengan mengacu pada kebijakan penggunaan DBHCHT. Keputusan teknis pelaksanaan kegiatan juga melibatkan koordinasi dengan dinas terkait dan penyuluh lapangan. Dalam perspektif Grindle, pengambilan keputusan yang relatif terpusat dapat memengaruhi fleksibilitas implementasi di tingkat lapangan. Kondisi ini membatasi kemampuan pelaksana untuk menyesuaikan program secara cepat terhadap kebutuhan spesifik kelompok tani. Namun demikian, koordinasi antaraktor yang dilakukan menunjukkan adanya upaya kolaboratif. Hal ini sejalan dengan pendapat Sari dan Yalia (2019) yang menyatakan bahwa sinergi merupakan bentuk kolaborasi antaraktor yang saling melengkapi dan mampu menghasilkan capaian yang lebih besar dibandingkan jika masing-masing pihak bekerja secara terpisah.

5. Pelaksana Program (*Program Implementers*)

Pelaksana program memiliki kompetensi yang memadai, namun keterbatasan jumlah pelaksana menyebabkan perangkapan tugas dan berkurangnya intensitas pendampingan. Menurut Grindle, efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kecukupan pelaksana dalam menjalankan peran mereka secara konsisten. Hal ini juga diperkuat dengan (V.Fimidia et al., 2024) dalam hasil penelitiannya yang menunjukan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, serta koordinasi yang lemah antar lembaga merupakan hambatan utama dalam proses implementasi.

6. Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*)

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran DBHCHT menjadi kendala utama dalam implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau. Dalam teori Grindle, ketersediaan sumber daya merupakan prasyarat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Keterbatasan sumber daya tersebut membatasi jangkauan program serta efektivitas pendampingan kepada kelompok tani. Sejalan dengan hal tersebut, Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan cenderung menjadi tidak efektif meskipun perintah implementasi telah disampaikan secara jelas dan konsisten, apabila pelaksana tidak didukung oleh sumber daya yang memadai (Subekti et al., 2017).

Context (Lingkungan Kebijakan)

1. Kekuatan, Kepentingan, dan Aktor yang Terlibat (*Power, Interests, and Strategies of Actors Involved*)

Implementasi program melibatkan berbagai aktor, seperti UPT Agribisnis Tembakau, penyuluh lapangan, kelompok tani, dan pemangku kepentingan terkait. Dalam perspektif Grindle, perbedaan kekuasaan, kepentingan, dan strategi antaraktor memengaruhi dinamika implementasi kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UPT memiliki kewenangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sementara kelompok tani berperan sebagai penerima manfaat. Strategi pelaksanaan lebih bersifat *top-down* dengan pendekatan pembinaan, yang dalam praktiknya belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif seluruh anggota kelompok tani.

2. Karakteristik Institusi dan Rezim (*Institutional and Regime Characteristics*)

Secara institusional, UPT Agribisnis Tembakau memiliki struktur organisasi dan tugas pokok yang jelas. Namun, dalam kerangka Grindle, karakteristik institusi juga berkaitan dengan kapasitas organisasi dalam menghadapi kompleksitas implementasi. Keterbatasan personel dan luasnya wilayah binaan menunjukkan bahwa kapasitas institusi masih perlu diperkuat.

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

Pelaksana program menunjukkan kepatuhan terhadap pedoman pelaksanaan program serta respons terhadap permasalahan di lapangan. Dalam teori Grindle, kepatuhan dan daya tanggap merupakan indikator

penting efektivitas implementasi. Namun, keterbatasan sumber daya menyebabkan respons pelaksana belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh kendala yang muncul.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau (Managris) di UPT Agribisnis Tembakau Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024. Hal ini tercermin dari kesesuaian jenis kegiatan, mekanisme pendampingan, serta sasaran program yang diarahkan pada peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan manajemen usaha tani, pendampingan teknis budidaya dan pascapanen, serta penguatan kelembagaan kelompok tani. Program ini disusun berdasarkan kebutuhan kelompok tani dan dinilai mampu memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman petani dalam perencanaan dan pengelolaan usaha tani tembakau, meskipun peningkatan kualitas bahan baku secara nyata belum dirasakan secara optimal dan merata oleh seluruh kelompok tani binaan.

Namun demikian, implementasi Program Managris belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Belum optimalnya pelaksanaan program dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran DBHCHT, rendahnya intensitas pendampingan di lapangan, serta koordinasi dan komunikasi yang belum sepenuhnya merata antara pelaksana program dan kelompok tani. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh petani dalam praktik budidaya dan pengelolaan pascapanen tembakau.

Sebagai respons terhadap berbagai hambatan tersebut, UPT Agribisnis Tembakau Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang telah melakukan sejumlah upaya perbaikan, antara lain melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, penyesuaian perencanaan kegiatan dengan ketersediaan anggaran, peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok tani, serta penguatan peran kelompok tani sebagai sarana pembelajaran dan pengawasan internal. Upaya-upaya ini menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan program serta meningkatkan efektivitas implementasi Program Managris dalam mendorong peningkatan kualitas bahan baku tembakau secara lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Sumedang.

REFERENSI

- Addawiyah, Febriani, L., & Fadillah, N. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 6–8.
- Ahmadi, A., Saleh, A., & Priyatna, W. B. (2025). *Komunikasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa*. 22(02), 106–107.
- Andini, D., Widodo, J., & Radjikan. (2023). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital Pada Aplikasi Klampid New Generation Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya*. 3(2), 6.
- Asmariva, H. (2015). Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Senapelan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. *Jom FISIP*, 2, 6–7.
- Dylanesia, W. (2023). *THE POWER OF TEAMWORK BAGAIMANA MENENTUKAN PERAN YANG EFEKTIF UNTUK MENCAPAI TUJUAN* (G. Irawan (ed.)). CAHAYA HARAPAN.
- Entjaurau, J. A., Sumampow, I., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kecamatan Pineleng. *Jurnal Governance*, 1(2), 8.
- Fahrudi, A. (2005). *Pengaruh Pendelegasian Wewenang oleh Camat Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran*. 16.
- Firdaus, R. (2020). *IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA BRINGIN JAYA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA*. 3(2), 5.
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang*. 2(3), 6–13.
- Haris, A., & Kusmanto, H. (2016). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Inspection Function of Inspectorate of Serding Bedagai Regency*. 6(1), 79.
- Herman. (2016). *Model Implementasi Program Efektif dan Efisien*. Badan Penerbit UNM.

- Husin, H. (2023). *Etika Kebijakan Publik*. CV. Diva Pustaka.
- Iskandar, A. (2016). Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat). *Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 11(1), 8.
- Kartono. (2013). *Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik (Studi Implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Di Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Arut Selat*.
- Madjid, U. (2021). *Pengantar Ilmu Administrasi* (S. PSL (ed.)). PT. Pustaka Interest Media Amani.
- Maharani, W. M., & Sukardi. (2016). Jurnal Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1/02, 140.
- Marnis & Priyono. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. In T. Chandra (Ed.), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Zifatama. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik*.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (ed.)). CV. Harfa Creative.
- Nursinar, Nurdin, F., Megawati, & Astaman, P. (2025). *Implementasi Program Penyuluhan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Batu Belerang Implementation of the Agricultural Extension Program and Its Impact on the Empowerment of Farmer Groups in Batu Belerang Village*. 13(1), 55.
- Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2019). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 89–102. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279>
- Rahmayanti, D., & Salomo, R. V. (2020). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS SATU CIPINANG*. 4(2), 3. <https://doi.org/10.35722/PUBBIS.V4I2.275>
- Ratitya, S. P., Prabawati, N. P. anik, & Wirantari I, D. A. P. (2024). *Implementasi Aplikasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam Mendukung Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tulungagung*. 2(4), 2.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2022). Buku ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik. In T. Multazam & M. D. K. Wardana (Eds.), *Umsida Press*. UMSIDA Press.
- Sampoh, V. D., Ruru, J. M., & Palar, N. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondou Utara*.
- Sari, D., & Yalia, M. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI UNTUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KOTA CIREBON. *Jurnal Pikom*, 20(1), 26.
- Septyaputri, M. (2015). *Studi Tentang Dampak Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kpegawaian Daerah Sidoarjo (SIMPEGDA) Pada Kepuasan Karir Guru Sekolah Dasar*.
- Setiawan, D. A., & Anisykurlillah, R. (2024). *IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM MEMFASILITASI KERUMAHTANGGAAN BIRO UMUM Sekertariat Derah Provinsi Jawa Timur*. 4(1), 58.
- Sidiq, U., & Choiri, Miftachul, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (A. Mujahidin (ed.)). Nata Karya.
- Subekti, M., Fapjanudin, M., & Rokhman, A. (2017). *Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektivitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak*. 3(2), 3.
- Subianto. (2020). *Kebijakan Publik*. Brilliant.
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (S. Y. Suryandi (ed.); Keenam). CV Alfabeta.
- Syarief, S. A. N. (2025). Administrasi Sekolah , Unsur-unsur Administrasi dan Bidang potensi yang ada dalam memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki melalui. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(3), 3. <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jmpai/article/download/1129/1488>
- V.Finidia, I., Zubaidah, S., Fuji, L. D., Uswatun, H. A., Huspita, S. F., Sinar, F. E., Basron, Aprin, Putra, D. B., & Dwi, S. A. (2024). *TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM RENSTRA DI KESBANGPOL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR*. 7(September), 99.